

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
7 Mei 2025



Daftar Isi

- Profil The Indonesian Institute
- Latar Belakang Evaluasi
- Tujuan Evaluasi
- Metode Evaluasi
- Temuan & Pembahasan
- Kesimpulan
- Rekomendasi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil The Indonesian Institute

Profil

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) independen, non partisan, dan nirlaba yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain:

a. penelitian,
b. survei,
c. fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),
d. diskusi publik,
e. pendidikan publik,
f. penulisan editorial mingguan (Wacana),
g. penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam bahasa Inggris),
h. kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment),
i. laporan tahunan (Indonesia Report),
j. forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!), dan
k. podcast Ngobrol Kebijakan (Ngobi).

Update Indonesia

Policy Talks

Initiative!

THE INDONESIAN Forum

WACANA

Ngobi
Ngobrol Kebijakan

Latar Belakang Evaluasi

- Pada **8 Mei 2025**, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 200 hari masa jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

- Kebijakan mereka, seperti Makan Bergizi Gratis, pembentukan BPI Danantara, bank emas, dan revisi UU TNI, menimbulkan beragam respons publik.

- Prabowo mengakui bahwa beberapa program awal merupakan lanjutan dari legasi Presiden Jokowi. Ia juga mengakui masih bermasalahnya komunikasi publik.

- Evaluasi 100 hari pemerintahan oleh CELIOS menunjukkan skor kinerja Prabowo 5/10 dan Gibran 3/10; beberapa menteri dinilai berkinerja buruk. Sementara, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapatkan 81,4% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

- Oleh karena itu, penting untuk memantau dan menganalisis kinerja Kabinet Merah Putih dalam perjalanannya dengan terukur dan disertai dengan rekomendasi kebijakan.



Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi

1

Menilai kinerja 48 menteri Kabinet Merah Putih pada 200 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan aspek komunikasi publik, partisipasi publik, kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan beberapa indikator KPI.

2

Memberikan informasi yang objektif dan berbasis data kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

3

Mendorong Kabinet Merah Putih dalam upaya memperbaiki tata kelola dan efektivitas pelaksanaan proses kebijakan publik ke depan.

Metode Evaluasi

Evaluasi ini menggunakan pendekatan **campuran** (*mixed methods*) yang menggabungkan teknik **kuantitatif dan kualitatif** untuk memperoleh gambaran kinerja menteri secara lebih komprehensif.

Secara kuantitatif, penelitian ini melakukan **skoring** terhadap sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti **komunikasi publik, partisipasi publik, kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan beberapa indikator kinerja utama (KPI).**

Penilaian ini dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui ***desk research*** dan **wawancara mendalam semi-terstruktur** dengan berbagai pakar dengan latar belakang **pengamat kebijakan publik, aktivis, akademisi, pengusaha, dan praktisi** guna memberikan konteks dan pandangan yang lebih dalam terhadap hasil analisis evaluasi dan skoring.

Indikator Evaluasi*

Komunikasi Publik

- Kecepatan respons untuk stabilitas
- Kejelasan informasi dan akurasi penyampaian pesan berbasis data
- Keterampilan komunikasi
- Pemanfaatan beragam platform

Partisipasi Publik

- Pelibatan masyarakat umum
- Inklusi masyarakat
- Respons terhadap kritik dan aspirasi
- Keterlibatan ahli/pakar

Kolaborasi Lintas Sektor

- Inovasi
- Pentahelix
- Kejelasan pembagian peran
- Dampak kolaborasi

Konsistensi Kebijakan

- Prioritas/*sense of urgency*
- Keselarasan dengan rencana pembangunan nasional
- Stabilitas dan prediktabilitas kebijakan
- Konsistensi dengan pernyataan publik dan komitmen

Key Performance Indicator

- Pencapaian target dan program (ketepatan sasaran)
- Pengelolaan anggaran dan efisiensi
- Kepemimpinan dan manajemen birokrasi (termasuk ketersediaan sistem terintegrasi)
- Akuntabilitas dan transparansi

**: Nilai 1 diberikan untuk sub-indikator yang ditemukan, selain itu 0. Penilaian final diperoleh setelah pembobotan dari temuan evaluasi.*

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Teori *Multiple Streams*, (Kingdon, 1984)

Kebijakan muncul ketika tiga aliran bertemu:

1. *Problem Stream* (masalah yang diakui publik dan pembuat kebijakan),
2. *Policy Stream* (solusi yang tersedia dan bisa diterapkan),
3. *Politics Stream* (dukungan politik dan momentum yang tepat).

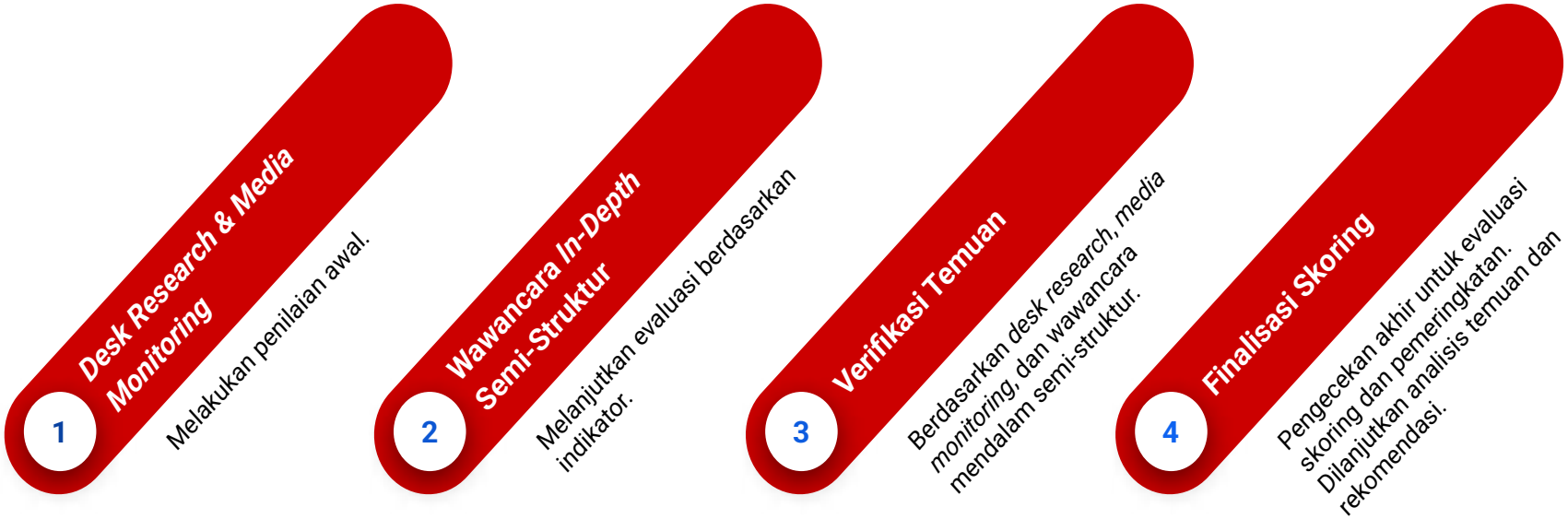
Teori Jaringan Kebijakan (Rhodes, 1997)

Kebijakan seringkali dibuat melalui jaringan aktor seperti pemerintah, NGO, bisnis, dan akademisi.

Jaringan kebijakan memfasilitasi koordinasi kepentingan publik dan swasta, serta sumber daya, dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik (Rhodes, 1997 dalam Taufik, 2017).

Alur Evaluasi

Alur Evaluasi



Skor 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih



Peringkat 1
Yassierli
(Menteri Ketenagakerjaan)
Skor: 18/20



Peringkat 2
Sri Mulyani Indrawati
(Menteri Keuangan)
Skor: 17/20

Peringkat 3
Skor: 16/20



Budi Gunadi Sadikin
(Menteri Kesehatan)



Meutya Viada Hafid
(Menteri Komunikasi dan Digital)



Teuku Riefky Harsya
(Menteri Ekonomi Kreatif)

Peringkat 4

Skor: 15/20



Airlangga Hartarto
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)



Dudy Purwagandhi
(Menteri Perhubungan)



Wihaji
(Menteri Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga)

Peringkat 5

Skor: 14/20



Abdul Muhaimin Iskandar
(Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat)



Arifatul Choiri Fauzi
(Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)



Pratikno
(Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)



Raja Juli Antoni
(Menteri Kehutanan)



Abdul Kadir Karding
(Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)



Agus Harimurti Yudhoyono
(Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)



Andi Amran Sulaiman
(Menteri Pertanian)



Budi Santoso
(Menteri Perdagangan)



Nasaruddin Umar
(Menteri Agama)



Prasetyo Hadi
(Menteri Sekretaris Negara)



Rini Widyantini
(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)



Rosan Perkasa Roeslani
(Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Peringkat 6

Skor: 13/20



Abdul Mu'ti
(Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah)



Brian Yuliarto
(Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)



Erick Thohir
(Menteri Badan Usaha Milik Negara)



Fadli Zon
(Menteri Kebudayaan)



Hanif Faisol Nurofiq
(Menteri Lingkungan Hidup)



Nusron Wahid
(Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Peringkat 7

Skor: 12/20



Agus Andrianto
(Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan)



Agus Gumiwang Kartasasmita
(Menteri Perindustrian)



Saifullah Yusuf
(Menteri Sosial)



Sugiono
(Menteri Luar Negeri)

Peringkat 8

Skor: 11/20



Dody Hanggodo
(Menteri Pekerjaan Umum)



Sakti Wahyu Trenggono
(Menteri Kelautan dan Perikanan)



Supratman Andi Agtas
(Menteri Hukum)



Yusril Ihza Mahendra
(Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)

Peringkat 9

Skor: 10/20



Rachmat Pambudy
(Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)



Widiyanti Putri Wardhana
(Menteri Pariwisata)

Peringkat 10

Skor: 9/20



Ario Bimo Nandito Ariotedjo
(Menteri Pemuda dan Olahraga)



Maman Abdurrahman
(Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah)



Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara
(Menteri Transmigrasi)



Muhammad Tito Karnavian
(Menteri Dalam Negeri)

Peringkat 11

Skor: 8/20



Budi Gunawan
(Menteri Koordinator Politik dan Keamanan)



Maruarar Sirait
(Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Peringkat 12

Skor: 7/20



Bahlil Lahadalia
(Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)



Natalius Pigai
(Menteri Hak Asasi Manusia)



Sjafrie Sjamsoeddin
(Menteri Pertahanan)



Zulkifli Hasan
(Menteri Koordinator Pangan)

Peringkat 13

Skor: 6/20



Budi Arie Setiadi
(Menteri Koperasi)



Yandri Susanto
(Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)

Peringkat 14

Skor: 4/20

Temuan dan Pembahasan

Menteri Kabinet Merah Putih di Kelompok 5 Teratas

Peringkat	Nama	Jabatan	Nilai
1	**Yassierli**	**Menteri Ketenagakerjaan**	**18**
2	**Sri Mulyani Indrawati**	**Menteri Keuangan**	**17**
3	**Budi Gunadi Sadikin**	**Menteri Kesehatan**	**16**
	Meutya Viada Hafid	**Menteri Komunikasi dan Digital**	**16**
	Teuku Riefky Harsya	**Menteri Ekonomi Kreatif**	**16**
4	Airlangga Hartarto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	15
	Dudy Purwagandhi	Menteri Perhubungan	15
	Wihaji	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga	15
5	Abdul Muhaimin Iskandar	Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat	14
	Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
	Pratikno	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	14
	Raja Juli Antoni	Menteri Kehutanan	14

Peringkat	Nama	Jabatan	Nilai
6	**Abdul Kadir Karding**	Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	13
	Agus Harimurti Yudhoyono	Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	13
	Andi Amran Sulaiman	Menteri Pertanian	13
	Budi Santoso	Menteri Perdagangan	13
	Nasaruddin Umar	Menteri Agama	13
	Prasetyo Hadi	Menteri Sekretaris Negara	13
	Rini Widyantini	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13
	Rosan Perkasa Roeslani	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	13
7	**Abdul Mu'ti**	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	12
	Brian Yuliarto	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	12
	Erick Thohir	Menteri Badan Usaha Milik Negara	12
	Fadli Zon	Menteri Kebudayaan	12
	Hanif Faisol Nurofiq	Menteri Lingkungan Hidup	12
	Nusron Wahid	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	12
8	**Agus Andrianto**	Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	11
	Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Perindustrian	11
	Saifullah Yusuf	Menteri Sosial	11
	Sugiono	Menteri Luar Negeri	11
9	**Dody Hanggodo**	Menteri Pekerjaan Umum	10
	Sakti Wahyu Trenggono	Menteri Kelautan dan Perikanan	10
	Supratman Andi Agtas	Menteri Hukum	10
	Yusril Ihza Mahendra	Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	10

Menteri Kabinet Merah Putih di Kelompok 5 Terbawah

Peringkat	Nama	Jabatan	Nilai
10	Rachmat Pambudy	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	9
	Widiyanti Putri Wardhana	Menteri Pariwisata	9
11	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	8
	Maman Abdurrahman	Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8
	Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara	Menteri Transmigrasi	8
	Muhammad Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri	8
12	**Budi Gunawan**	**Menteri Koordinator Politik dan Keamanan**	**7**
	Maruarar Sirait	**Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**7**
13	**Bahlil Lahadalia**	**Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**	**6**
	Natalius Pigai	**Menteri Hak Asasi Manusia**	**6**
	Sjafrie Sjamsoeddin	**Menteri Pertahanan**	**6**
	Zulkifli Hasan	**Menteri Koordinator Pangan**	**6**
14	**Budi Arie Setiadi**	**Menteri Koperasi**	**4**
	Yandri Susanto	**Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**	**4**

Indikator

Sub-Indikator

Komunikasi Publik **77,60%**

Isu utama: Tidak konsisten, impulsif, minim strategi, dan minim data.

- Para menteri **memanfaatkan penggunaan media sosial yang beragam** untuk menyebarkan informasi. **Terdapat menteri yang melakukan pertemuan dengan jejaring media** untuk perluasan jangkauan informasi.
- Banyak kebijakan disampaikan **tanpa kajian matang dan strategi komunikasi yang jelas** (misal: PPN 12%, UU TNI, gas LPG 3kg, pengangkatan CASN dan PPPK, perluasan sawah untuk swasembada pangan).
- Presiden dan para menteri kerap membuat **pernyataan *blunder*** (narasi yang berlebihan dan tidak empatik) yang justru menimbulkan kegaduhan publik.
- *Doorstop communication* menghasilkan **informasi sepotong-sepotong** yang membingungkan masyarakat.
- **Tidak ada pemahaman soal pentingnya "*legitimate expectation*"** dari publik atas setiap pernyataan pejabat negara.
- Komunikasi masih bergaya ***top-down/intimidating* dan reaktif (*old school communication*)**, serta kurang memanfaatkan kanal dan algoritma media sosial yang relevan dengan perilaku digital publik.

64,58% ⟹	Kecepatan respons untuk stabilitas
79,17% ⟹	Kejelasan informasi dan akurasi penyampaian pesan berbasis data
68,75% ⟹	Keterampilan komunikasi
97,92% ⟹	Pemanfaatan beragam platform

Indikator

Key Performance **60,94%**

Isu utama: Banyak program simbolik, kabinet gemuk, serta tidak menyentuh akar persoalan.

- Pengerjaan tugas, pokok, dan fungsi yang telah berjalan.
- **Adanya pengintegrasian data sebagai basis perumusan kebijakan yang tepat sasaran.** Contoh: peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bansos dan pemberdayaan, Ekraf Hunt untuk pemetaan *Intellectual Property* (IP).
- **Demokrasi dan kebebasan sipil menurun**.
- **Efisiensi anggaran memengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan target kebijakan.**
- Proses kebijakan ***top-down*** **dan belum sinkron**, **pemerintah daerah berusaha *align***, serta penerapan kebijakan yang **tidak detail, tanpa perencanaan yang matang, dan transparan**.
- **Pemilihan menteri** yang lebih **berdasarkan kepentingan** daripada kapabilitas.
- Pemetaan birokrasi dan koordinasi **lembaga baru memakan waktu.**
- **Program-program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan Sekolah Rakyat** tidak dibarengi dengan penguatan infrastruktur dan logistik (akses fisik dan sosial).
- **Banyak program** "kontroversial" tetapi **tidak konkret** (hanya sekadar jargon).

Sub-Indikator

41,67%	⟹	Pencapaian target dan program (ketepatan sasaran)
75,00%	⟹	Pengelolaan anggaran dan efisiensi
58,33%	⟹	Kepemimpinan dan manajemen birokrasi (termasuk ketersediaan sistem terintegrasi)
68,75%	⟹	Akuntabilitas dan transparansi

Indikator

Kolaborasi **55,73%**

Isu utama: Fragmentasi koordinasi, tidak transformatif, dan minim inovasi.

- Apresiasi kepada menteri yang **sudah** melakukan **kolaborasi lintas sektor. Contoh: Menteri Ketenagakerjaan berdialog dengan ojol dan platform aplikasi, serikat pekerja dan menjalin pentahelix dengan ahli dan masyarakat sipil.**
- Dominasi pimpinan dan **gaya birokrasi** hierarkis membuat kolaborasi tidak *genuine*.
- Program kolaboratif seperti **MBG dianggap tidak melibatkan aktor lokal yang relevan** (lingkungan hidup, petani lokal, UMKM lokal, komunitas).
- Pembagian tugas dan kewenangan yang masih **tumpang tindih** akibat pemisahan-pemisahan kementerian.
- Agenda **kolaborasi yang belum menunjukkan tindak lanjut** dan dampak.
- Beberapa Menko belum berhasil menyinergikan menteri di bawahnya ditandai dengan **minimnya integrasi data dampak kolaborasi** dan koordinasi yang *superficial*.

Sub-Indikator

62,50%	⟹	Inovasi
64,58%	⟹	Pentahelix
64,58%	⟹	Kejelasan pembagian peran
31,25%	⟹	Dampak kolaborasi

Indikator

Sub-Indikator

Konsistensi Kebijakan **44,27%**

Isu utama: Sering berubah karena tekanan publik, seremonial, bias kepentingan, serta tanpa arah jangka panjang dan strategi yang jelas.

- **Kebijakan prioritas Kemenkes sudah berdasarkan data (tren penyakit) masyarakat Indonesia. Contoh, pemerataan fasilitas kesehatan, skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit karena ancaman PTM, penanggulangan TB.**
- Kebijakan seperti PPN 12%, impor mobil listrik, dan proyek investasi besar **cenderung berubah-ubah** mengikuti reaksi dan tekanan publik, bukan kajian.
- Efisiensi anggaran **vs anomali kebijakan.**
- **Kebijakan yang anomali.** Misal: pembentukan koperasi yang *top-down.*
- **Tidak ada *lessons learned* dari program gagal sebelumnya.** Misal: perluasan lahan untuk *food estate.*
- Tidak paham bagaimana menyusun target spesifik dan prioritas, sehingga **banyak program tidak relevan** tetap dilanjutkan.
- Pernyataan dan sikap antar menteri dan menteri dengan presiden/wakil presiden yang tidak selaras. Wakil Presiden mendukung AI, Muhaimin Iskandar memberikan pernyataan yang tidak sejalan.

35,42%	⟹	Prioritas/*sense of urgency*
81,25%	⟹	Keselarasan dengan rencana pembangunan nasional
20,83%	⟹	Stabilitas dan prediktabilitas kebijakan
39,58%	⟹	Konsistensi dengan pernyataan publik dan komitmen

Indikator

Partisipasi Publik **42,71%**

Isu utama: Asas partisipasi hanya formalitas dan tidak bermakna; reaktif, bukan proaktif.

- Beberapa K/L seperti **Kemenkeu dan Kemenkes dinilai lebih baik karena masih melibatkan ahli dan membuat laporan terbuka.**
- Dalam pembentukan UU, **partisipasi publik minim** atau bahkan **nihil** (contoh: Danantara, MBG, UU BUMN, UU TNI, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda).
- **Partisipasi sebatas formalitas** dan **belum** dilakukan secara **inklusif** serta **bermakna** di segala sektor terutama dengan melibatkan kelompok rentan (masyarakat adat, penyandang disabilitas, orang muda, ODHIV, perempuan, lansia, minoritas, status sosial ekonomi terbawah)
- **Tidak ada komitmen** serius untuk **demokrasi & HAM.**
- Pemerintah **hanya merespons** saat publik marah, **bukan** mengantisipasi **melalui pelibatan** sejak awal.
- Namun, di sektor lain (pariwisata, pertanian, investasi), partisipasi sangat lemah dan tidak terstruktur.

Sub-Indikator

43,75%	⟹	Pelibatan masyarakat umum
25,00%	⟹	Inklusi masyarakat
33,33%	⟹	Respons terhadap kritik dan aspirasi
68,75%	⟹	Keterlibatan ahli/pakar

Analisis Evaluasi Berdasarkan Teori *Multiple Streams*, (Kingdon, 1984)

Problem Stream

Pemerintah **telah memetakan masalah** prioritas di awal pemerintahan untuk dibenahi. **Namun,**

- Tidak ada *progress* signifikan dari pemerintahan Prabowo.
- Kabinet terlalu gemuk.
- Kinerja kementerian belum optimal, komunikasi tidak efektif.
- UU dibuat dengan proses bermasalah (tidak partisipatif).
- Kemunduran demokrasi dan HAM, militerisme kembali dominan.
- Program *flagship* (MBG) tidak siap dan menimbulkan masalah baru.

 Masalah telah disuarakan dan didesak publik dan pengamat kebijakan, **tetapi tidak direspons dengan memadai** oleh pemerintah.

Policy Stream

Ada kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk menjawab masalah, **namun**:

- Ada ketidaksiapan teknis dalam implementasi kebijakan (contoh: target ekonomi 8%, MBG).
- Komunikasi publik yang masih bermasalah dan justru menimbulkan kegaduhan.
- Kurangnya ketepatan sasaran kebijakan dalam mengatasi akar permasalahan.
- Anomali kebijakan vs efisiensi anggaran.
- Terhambatnya pelaksanaan kebijakan akibat lambatnya pemetaan birokrasi baru dan efisiensi anggaran.

 Kebijakan belum menjawab **banyak permasalahan seperti terkait instrumen hukum yang belum diimplementasikan dengan baik, fungsi lembaga yang masih tumpang tindih, dan masih kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga.**

Politics Stream

- Politik terlalu sentralistik dan transaksional: jabatan banyak diisi atas dasar akomodasi politik dan kepentingan.
- *Free rider* dalam proses kebijakan.
- Lemahnya kepemimpinan.
- DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan karena semua partai berada dalam koalisi pemerintah.
- Politik cenderung stabil secara permukaan, tetapi substansinya menurun (HAM, demokrasi, intervensi eksekutif ke yudikatif).

 Secara politik, **terkesan ada stabilitas,** tetapi **tidak ada komitmen dan langkah nyata** untuk perbaikan kinerja substantif dalam proses kebijakan.

Analisis Evaluasi Berdasarkan Teori Policy Network Theory (Rhodes, 1997)

- Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Misal: Koperasi Merah Putih).
- Masukan publik (NGO, mahasiswa, media, pakar, praktisi, masyarakat marjinal, dan pemangku kepentingan terkait lainnya) diabaikan dalam proses pembentukan UU (RUU TNI, KUHAP, dll) — kolaborasi dan partisipasi publik masih formalitas.
- Banyak program tidak berjalan karena lemahnya koordinasi antar aktor dan pengabaian terhadap aktor non-pemerintah (Misalnya: MBG yang tidak transparan, tidak akuntabel, pemetaan pembagian peran lintas sektor yang jelas).
- Sektor swasta dan masyarakat "jalan sendiri" karena pemerintah gagal menunjukkan kapasitas tata kelola (*glitch* pemerintah).

 Ini menunjukkan **jaringan kebijakan tidak terbentuk secara sehat dan tidak mendorong partisipasi publik yang inklusif dan bermakna, serta berdampak.** Aktor non-negara tidak terlibat secara bermakna, dan kebijakan didominasi elite politik dan militer, serta konflik kepentingan.

Kesimpulan

Dari teori *Multiple Streams*, stagnasi kebijakan di Kabinet Merah Putih terjadi karena tidak ada titik temu antara masalah, solusi, dan momentum politik. Sementara, berdasarkan kacamata *Policy Network Theory*, kegagalan terjadi karena lemahnya koordinasi, keterlibatan aktor non-negara yang rendah, dan dominasi elite dalam proses kebijakan.

Kabinet Merah Putih masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kinerjanya. Perbaikan ini memerlukan kepemimpinan yang efektif, kelembagaan yang jelas, manajemen sumber daya kebijakan publik yang baik, serta program kerja yang terukur. Para menteri perlu bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen mereka dalam menjalankan tupoksinya, terutama dalam hal:

1. **Komunikasi publik yang responsif, konsisten, dan transparan.**
2. **Peningkatan partisipasi dan kolaborasi multipihak secara bermakna.**
3. **Konsistensi kebijakan lintas sektor dan sinergi lintas pemangku kebijakan.**

Prioritas perbaikan kinerja sebaiknya dimulai dari indikator strategis seperti koordinasi lintas kementerian, disusul dengan peningkatan komunikasi publik, transparansi proses kebijakan, dukungan sumber daya, mekanisme evaluasi kinerja berbasis data secara berkala, pembukaan keran partisipasi publik seluasnya yang inklusif dan bermakna, dan peningkatan akuntabilitas anggaran. Langkah ini penting agar kebijakan dapat direncanakan, diterapkan, dan dievaluasi secara relevan dan kontekstual, serta mendapatkan dukungan publik yang kuat.

Rekomendasi

***Problem Stream*: Menyelesaikan Masalah Tata Kelola dan Kinerja Menteri**

- Presiden harus memperbaiki komunikasi publik dengan menetapkan masalah prioritas nasional secara terbuka, dan menyampaikan *roadmap* kerja jangka pendek (6–12 bulan) agar publik dan aktor kebijakan memiliki orientasi yang sama.
- Evaluasi menteri dilakukan berkala dengan indikator yang transparan dan akuntabel: kapasitas profesional, urgensi peran menteri, dan prinsip AUPB.
- Memastikan mekanisme partisipasi publik dan masukan, serta kritik kebijakan ditindaklanjuti dengan jelas, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi publik.

***Policy Stream*: Menyediakan Solusi Terukur dan Komunikatif**

- Perbaiki komunikasi publik kementerian: gunakan bahasa resmi, berbasis data, dan hindari komentar yang tidak substansial/tidak profesional.
- Pastikan kebijakan dan program memiliki desain teknokratik yang realistis dan berdampak, bukan hanya simbolik. Hal ini juga perlu disusun dengan konsultasi publik yang komprehensif.
- Melakukan perencanaan dan uji coba kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- Mendorong sistem pelaporan capaian kinerja berbasis indikator yang dapat diakses publik.

***Politics Stream*: Membangun Momentum dan Dukungan Politik Publik**

- Presiden dan pejabat tinggi membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan bermakna, terutama dari kelompok terdampak langsung, bukan hanya elite atau akademisi.
- Memperkuat forum kebijakan multi pihak untuk mengkoordinasikan beragam pemangku kepentingan, menjembatani perbedaan posisi, dan membangun legitimasi sosial-politik kebijakan, serta membangun kolaborasi yang kuat antar sektor.

Jaringan Kebijakan: Mendorong Kolaborasi Multi Pihak

- Pemerintah perlu **meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan antar sektor** (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, media) dalam seluruh siklus kebijakan.
- Pemerintah perlu **memperkuat kapasitas masyarakat sipil** dengan dukungan kelembagaan dan pendanaan agar bisa terlibat aktif dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik yang lebih bermakna.
- Pemerintah harus **mengurangi hambatan birokrasi** agar jaringan kebijakan berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik, memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data untuk mengukur capaian kebijakan secara obyektif dan akuntabel, serta melakukan evaluasi capaian kerja sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.



Terima Kasih!

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute